BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN KINERJA

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026 (TRIWULAN I)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah serta Rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan Buku Laporan Pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 Triwulan I (sampai dengan bulan Maret 2026).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa semua kegiatan yang didanai dari APBD harus terpenuhi kriteria pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal pengendalian kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat.

Dengan telah terlaksanakannya kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (sampai dengan bulan Maret 2026), sebagai bahan Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, maka laporan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dijadikan acuan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini, untuk itu saran, pendapat yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya laporan kami.

Demikian kata pengantar ini kami buat, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat.

Sukoharjo, April 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina
NIP 197603102011011006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Pendahuluan 1
B. Dasar Hukum 2
BAB II STRUKTUR APBD 4
BAB III REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD 6
A. Pagu Anggaran/Belanja 6
B. Target 7
C. Realisasi Belanja 7
D. Perbandingan Realisasi Belanja Dengan Tahun Sebelumnya 8
BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10
BAB V KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN 12
A. Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu 12
B. Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Target Kabupaten 14
C. Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Target OPD 15
D. Perbandingan Kinerja OPD Dengan Tahun Sebelumnya 16
BAB VI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH 19
BAB VII PROYEK STRATEGIS 22
BAB VIII INFRASTRUKTUR 24
BAB IX PENUTUP 26
A. Kesimpulan 26
B. Rekomendasi 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	:	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBD Tahun 2026 Keadaan s.d Bulan Maret 2026
Lampiran II	:	Perbandingan Target dan Realisasi APBD Tahun 2026 Keadaan s.d Bulan Maret 2026
Lampiran III	:	Perbandingan Belanja Masing-Masing Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan 2026
Lampiran IV	:	Progres Pelaksanaan Proyek Strategis s.d Bulan Maret 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja APBD Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Triwulan I Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban awal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyusunan laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip good governance melalui penyediaan informasi yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Sebagai dokumen evaluatif pada tahap awal tahun anggaran, laporan ini tidak hanya menyajikan data realisasi anggaran dan capaian fisik kegiatan pada Triwulan I, tetapi juga dilengkapi dengan analisis terhadap tingkat kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Analisis tersebut mencakup perbandingan antara rencana dan realisasi, identifikasi tingkat capaian output dan outcome, serta evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai progres awal pelaksanaan APBD, sekaligus menjadi dasar dalam menilai kesiapan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja tahunan.

Triwulan I merupakan fase awal pelaksanaan anggaran yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pada periode ini, tingkat kesiapan administratif, perencanaan teknis, serta koordinasi antar perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, evaluasi pada Triwulan I menjadi krusial sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai kendala yang mungkin timbul, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun kelembagaan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat dan cepat guna meminimalisir risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun rendahnya penyerapan anggaran di akhir tahun.

Lebih lanjut, laporan ini juga menggambarkan tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan implementasi di lapangan. Kesesuaian tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, laporan Triwulan I berfungsi sebagai alat pengendalian *(control mechanism)* yang

memberikan umpan balik bagi perangkat daerah dalam menyempurnakan strategi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

Informasi yang dihimpun dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan disiplin anggaran, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Penyajian data yang akurat dan analisis yang komprehensif diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Mekanisme anggaran dan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
STRUKTUR APBD

Struktur belanja APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur APBD Penetapan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**584.753.782.401**
4.1.01	Pajak Daerah	367.140.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.304.664.780.392**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.377.440.772
	Jumlah Pendapatan	**1.889.418.562.793**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.601.149.948.631**
5.1.01	Belanja Pegawai	977.505.675.467
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.768.597.091
5.1.04	Belanja Subsidi	756.864.073
5.1.05	Belanja Hibah	55.476.512.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.642.300.000
5.2	**BELANJA MODAL**	122.450.956.270
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.702.209.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.975.185.317
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.120.781.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.952.166.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.700.614.453
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.064.318.892
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.064.318.892
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**287.631.747.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	260.425.185.000
	Jumlah Belanja	2.016.296.970.793
	Total Surplus/(Defisit)	**-126.878.408.000**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**133.878.408.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.878.408.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**133.878.408.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**126.878.408.000**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB III
REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD

Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 berdasarkan laporan dari masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

A. PAGU ANGGARAN BELANJA

Rincian pagu belanja disusun berdasarkan jenis belanja yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer, dengan penyesuaian yang dilakukan melalui Perubahan APBD untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan dan kondisi fiskal daerah.

Adapun struktur dan besaran pagu anggaran belanja tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran		% thd Pagu
Belanja Operasi	Rp.	1.601.149.948.631	79,41%
Belanja Modal	Rp.	122.450.956.270	6,07%
Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.064.318.892	0,25%
Belanja Transfer	Rp.	287.631.747.000	14,27%
Total Anggaran	**Rp.**	**2.016.296.970.793**	**100%**

Sumber : Data diolah

Grafik 3.1
Persentase Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026
per Jenis Belanja

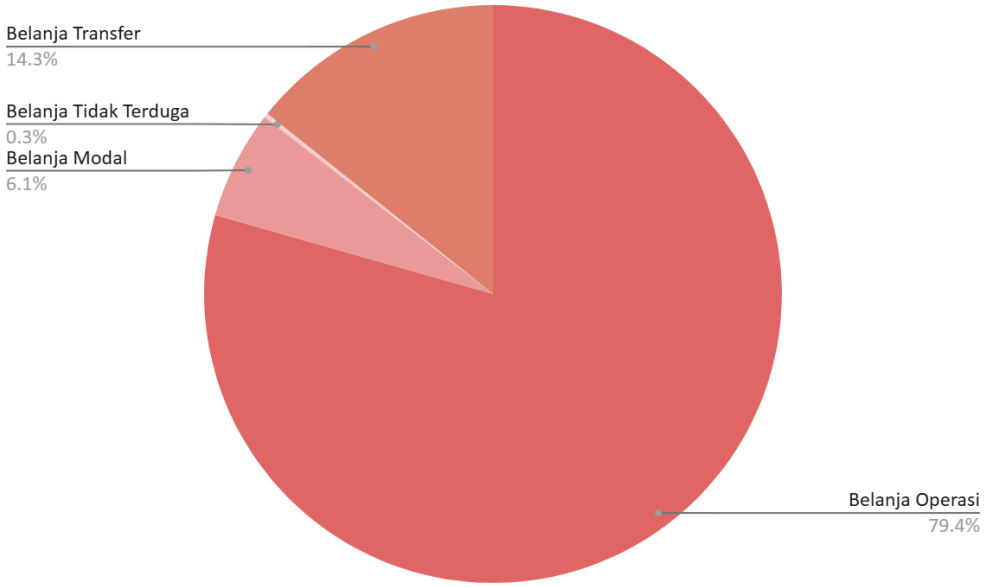

Sumber : Data diolah

B. TARGET

Tabel berikut menyajikan target pengeluaran anggaran berdasarkan jenis belanja yang telah direncanakan. Data ini mencakup alokasi dana untuk setiap kategori belanja, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Penyusunan target ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, serta selaras dengan sasaran strategis Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.2
Target Capaian Keuangan Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d Maret 2026

Jenis Belanja	Target		% thd Pagu
Belanja Operasi	Rp.	944.806.094.930	59,17%
Belanja Modal	Rp.	40.333.501.781	31,87%
Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.421.895.692	67,57%
Belanja Transfer	Rp.	154.110.747.000	53,75%
Total Target	**Rp.**	**1.142.672.239.403**	**56,70%**

Sumber : Data diolah

C. REALISASI BELANJA

Tabel realisasi belanja berikut menggambarkan tingkat penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer untuk mengidentifikasi komponen belanja yang masih perlu dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d Maret 2026

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		% thd Pagu	% thd Target
Belanja Operasi	Rp.	366.356.542.659	22,90%	38,78%
Belanja Modal	Rp.	7.256.457.387	5,93%	17,99%
Belanja Tidak Terduga	Rp.	0	0%	0%
Belanja Transfer	Rp.	67.853.893.835	23,59%	44,03%
Total Realisasi	**Rp.**	**441.466.893.881**	**21,89%**	**38,63%**

Sumber : Data diolah

Untuk menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran daerah selama tahun berjalan, berikut disajikan grafik tren realisasi belanja APBD Tahun 2026 per bulan. Grafik ini menunjukkan pola pertumbuhan realisasi belanja dari Januari hingga Maret 2026.

Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Sukoharjo
s.d Bulan Maret 2026

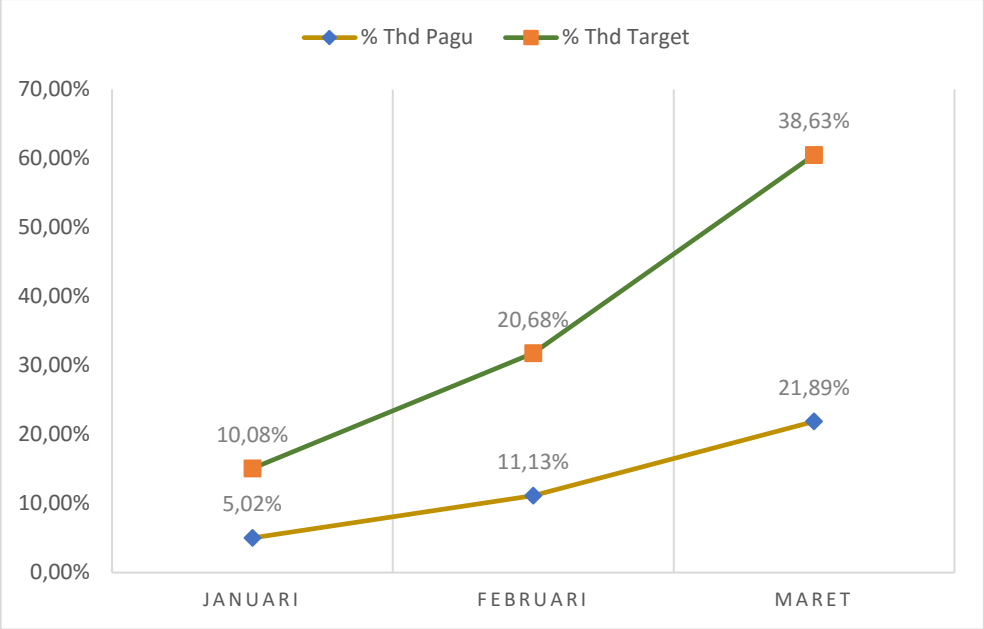

Sumber : Data diolah

D. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TAHUN BERJALAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan anggaran, berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2026 dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat penyerapan anggaran serta perubahan pola belanja dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Belanja
s.d Bulan Maret Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Jenis Belanja	**Tahun 2025**		**Tahun 2026**		**(+/-) %**
	Rp.	**%**	**Rp.**	**%**	
Belanja Operasi	322.550.294.776	18,82%	366.356.542.659	22,90%	4,08%
Belanja Modal	5.233.683.477	3,42%	7.256.457.387	5,93%	2,51%
Belanja Tidak Terduga	130.936.292.192	39,67%	0	0%	-39,67%
Belanja Transfer	0,00	0,00%	67.853.893.835	23,59%	23,59%
Total Realisasi	**458.720.270.445**	**20,73%**	**441.466.893.881**	**21,89%**	**1,16%**

Sumber : Data diolah

Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2026 dengan Tahun 2025

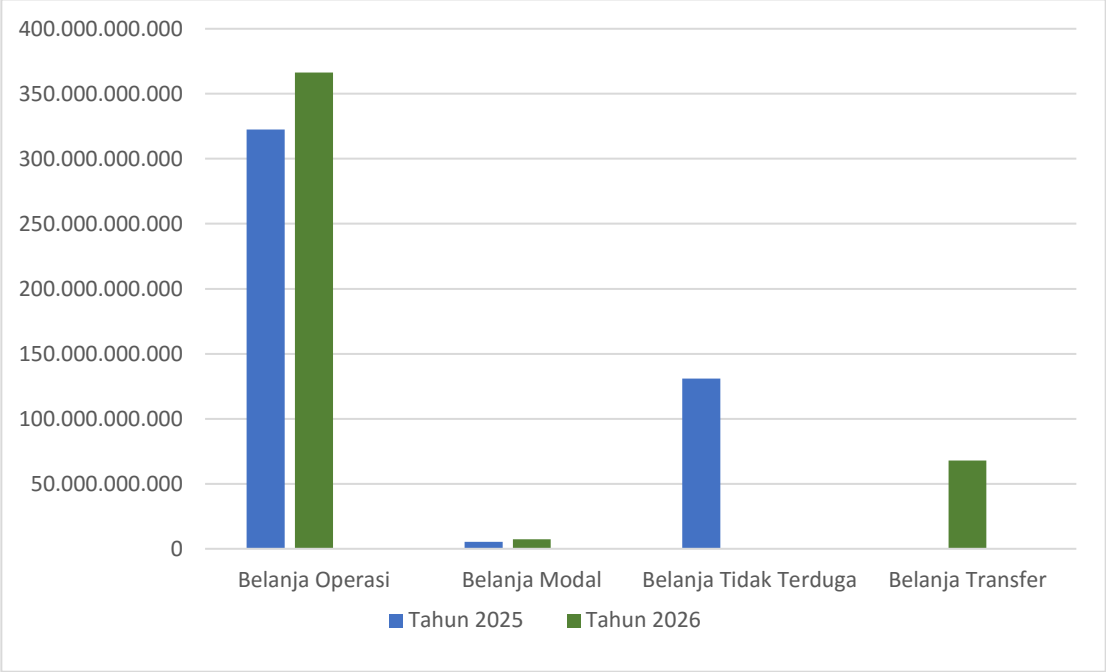

Sumber : Data diolah

BAB IV
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 8 April 2026 adalah sebesar Rp. 110.940.296.334,00 (18,97%) dari total Anggaran sebesar Rp. 584.753.782.401,00. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 8 April 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2026 s.d 8 April 2026

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.889.418.562.793	388.926.547.127	20,58
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	584.753.782.401	110.940.296.334	18,97
04.01.01	Pajak Daerah	367.140.000.000	103.862.333.268	28,28
04.01.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694	5.476.570.711	4,38
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	-	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707	1.601.392.355	3,25
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	584.753.782.401	110.940.296.334	18,97
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.304.664.780.392	277.986.250.793	21,31
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	159.019.475.239	13,35
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.344.546.000	1.077.842.400	5,57
4.2.01.07.001	DBH Pajak	18.921.166.000	992.901.100	5,25
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	423.380.000	84.941.300	20,06
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	760.481.391.000	189.270.345.000	24,89
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	757.081.391.000	189.270.345.000	25,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	3.400.000.000	-	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	274.656.994.620	82.425.876.239	30,01
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	274.656.994.620	82.425.876.239	30,01
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.054.482.931.620	272.774.063.639	25,87

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.05	Dana Desa	136.804.408.000	-	-
4.2.01.05.001	Dana Desa	136.804.408.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	136.804.408.000	-	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.377.440.772	5.212.187.154	4,60
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	105.546.440.772	5.212.187.154	4,94
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.831.000.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	113.377.440.772	5.212.187.154	4,60
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.304.664.780.392	277.986.250.793	21,31
	JUMLAH PENDAPATAN	1.889.418.562.793	388.926.547.127	20,58

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB V
KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN PAGU

Data perbandingan realisasi APBD Tahun 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 terhadap pagu menggambarkan kontribusi masing-masing OPD terhadap keseluruhan pelaksanaan anggaran Kabupaten Sukoharjo tahun 2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Kab. Sukoharjo
s.d Maret 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.427.177.710,00	180.591.247.258	30,13%
2	Dinas Sosial	17.889.976.940,00	5.014.306.459	28,03%
3	Rumah Sakit Daerah	101.800.000.000,00	26.707.570.145	26,24%
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.261.646.000,00	2.625.610.665	23,31%
5	Kecamatan Gatak	3.500.455.274,00	765.623.703	21,87%
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.117.147.900,00	2.626.334.335	21,67%
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.364.326.185,00	72.339.117.073	21,63%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.195.936.000,00	691.249.208	21,63%
9	Sekretariat DPRD	78.361.380.309,00	16.804.465.296	21,44%
10	Dinas Perhubungan	46.821.199.170,00	9.739.552.912	20,80%
11	Satuan Polisi Pamong Praja	14.980.493.900,00	3.037.024.584	20,27%
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.424.141,00	1.595.456.962	20,20%
13	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232,00	649.437.045	20,02%
14	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299,00	6.197.795.399	19,90%
15	Sekretariat Daerah	57.584.201.300,00	11.352.702.493	19,71%
16	Inspektorat Daerah	10.213.972.000,00	1.972.267.727	19,31%
17	Kecamatan Grogol	3.134.666.000,00	605.100.258	19,30%
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.703.325.920,00	1.485.875.078	19,29%
19	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808,00	894.821.201	19,18%
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.925.287.400,00	4.174.033.805	19,04%
21	Kecamatan Baki	3.348.790.000,00	634.184.383	18,94%
22	Kecamatan Nguter	3.068.998.000,00	575.545.321	18,75%
23	Kecamatan Bulu	2.985.390.755,00	542.505.472	18,17%
24	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000,00	588.049.002	18,13%
25	Kecamatan Tawangsari	3.075.321.300,00	552.494.278	17,97%
26	Dinas Kesehatan	327.432.287.517,00	58.265.842.484	17,79%
27	Kecamatan Weru	3.011.279.000,00	527.679.765	17,52%
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.489.134.502,00	1.307.150.184	17,45%
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.628.431.730,00	1.646.899.249	17,10%

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
30	Kecamatan Kartasura	6.848.267.634,00	1.169.792.770	17,08%
31	Dinas Pangan	5.624.270.280,00	937.490.970	16,67%
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.819.057.202,00	1.744.460.955	16,12%
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.714.083.000,00	1.237.275.817	16,04%
34	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.394.619.645,00	2.599.074.321	15,85%
35	Kecamatan Sukoharjo	27.535.402.100,00	4.275.409.807	15,53%
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.210.127.124,00	4.783.674.073	14,40%
37	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.267.543.235,00	2.845.462.191	13,38%
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.719.057.000,00	1.267.307.425	8,06%
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000,00	1.343.036.063	7,94%
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.621.834.281,00	4.753.967.745	4,01%
	JUMLAH	**2.016.296.970.793**	**441.466.893.881**	**21,89%**

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut, kemudian dianalisis dan diperoleh 3 OPD dengan capaian realisasi APBD tertinggi dibandingkan Pagu Anggaran, yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 30,13%
2. Dinas Sosial sebesar 28,03%
3. Rumah Sakit Daerah sebesar 26,24%

Adapun 3 OPD dengan capaian realisasi APBD terendah, yaitu :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 8,06% dikarenakan :
   a. Untuk 94 paket pekerjaan fisik masih dalam tahap perencanaan dengan rencana realisasi pada Triwulan II.
   b. Kegiatan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan jumlah 205 penerima bantuan, saat ini masih dalam proses administrasi pencairan, dengan target pencairan pada Triwulan II.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 7,94% dikarenakan alokasi besar seperti Beasiswa (Rp2,5 M) realisasi direncanakan pada Triwulan 4, Rehabilitasi Gelora Jombor (Rp2,8 M) pada Triwulan 3, serta rangkaian kegiatan POPDA pada Triwulan 2 hingga Triwulan 3, dan *event* daerah (seleksi duta wisata, peringatan HUT kabupaten dan HUT RI, hari sumpah pemuda, dan jambore pemuda) pada Triwulan 2 hingga Triwulan 4.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar 4,01% dikarenakan kegiatan fisik sebagian besar belum berjalan dan sebagian besar kegiatan fisik lainnya masih di tahap proses pengadaan.

Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari laporan ini.

B. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN TARGET KABUPATEN

Tabel perbandingan realisasi keuangan dengan target kabupaten merupakan bentuk analisis untuk melihat tingkat capaian kinerja keuangan masing-masing OPD dalam mendukung target pembangunan kabupaten secara keseluruhan, dan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target Kabupaten Kab. Sukoharjo
s.d. Maret 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TARGET KAB.	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.427.177.710	180.591.247.258	25%	30,13%
2	Dinas Sosial	17.889.976.940	5.014.306.459	25%	28,03%
3	Rumah Sakit Daerah	101.800.000.000	26.707.570.145	25%	26,24%
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.261.646.000	2.625.610.665	25%	23,31%
5	Kecamatan Gatak	3.500.455.274	765.623.703	25%	21,87%
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.117.147.900	2.626.334.335	25%	21,67%
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.364.326.185	72.339.117.073	25%	21,63%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.195.936.000	691.249.208	25%	21,63%
9	Sekretariat DPRD	78.361.380.309	16.804.465.296	25%	21,44%
10	Dinas Perhubungan	46.821.199.170	9.739.552.912	25%	20,80%
11	Satuan Polisi Pamong Praja	14.980.493.900	3.037.024.584	25%	20,27%
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.424.141	1.595.456.962	25%	20,20%
13	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232	649.437.045	25%	20,02%
14	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299	6.197.795.399	25%	19,90%
15	Sekretariat Daerah	57.584.201.300	11.352.702.493	25%	19,71%
16	Inspektorat Daerah	10.213.972.000	1.972.267.727	25%	19,31%
17	Kecamatan Grogol	3.134.666.000	605.100.258	25%	19,30%
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.703.325.920	1.485.875.078	25%	19,29%
19	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808	894.821.201	25%	19,18%
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.925.287.400	4.174.033.805	25%	19,04%
21	Kecamatan Baki	3.348.790.000	634.184.383	25%	18,94%
22	Kecamatan Nguter	3.068.998.000	575.545.321	25%	18,75%
23	Kecamatan Bulu	2.985.390.755	542.505.472	25%	18,17%
24	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000	588.049.002	25%	18,13%
25	Kecamatan Tawangsari	3.075.321.300	552.494.278	25%	17,97%
26	Dinas Kesehatan	327.432.287.517	58.265.842.484	25%	17,79%
27	Kecamatan Weru	3.011.279.000	527.679.765	25%	17,52%
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.489.134.502	1.307.150.184	25%	17,45%
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.628.431.730	1.646.899.249	25%	17,10%
30	Kecamatan Kartasura	6.848.267.634	1.169.792.770	25%	17,08%
31	Dinas Pangan	5.624.270.280	937.490.970	25%	16,67%
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.819.057.202	1.744.460.955	25%	16,12%

RANK	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TARGET KAB.	%
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.714.083.000	1.237.275.817	25%	16,04%
34	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.394.619.645	2.599.074.321	25%	15,85%
35	Kecamatan Sukoharjo	27.535.402.100	4.275.409.807	25%	15,53%
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.210.127.124	4.783.674.073	25%	14,40%
37	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.267.543.235	2.845.462.191	25%	13,38%
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.719.057.000	1.267.307.425	25%	8,06%
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000	1.343.036.063	25%	7,94%
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.621.834.281	4.753.967.745	25%	4,01%
	JUMLAH	**2.016.296.970.793**	**441.466.893.881**	**25%**	**21,89%**

Sumber : Data diolah

C. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN TARGET OPD

Untuk menilai pencapaian kinerja OPD, dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan realisasi keuangan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun perbandingan antara realisasi keuangan dengan target hingga periode bulan Maret 2026 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target OPD Kab. Sukoharjo
s.d. Maret 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
1	Rumah Sakit Daerah	28.406.403.000	26.707.570.145	94,02%
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.981.695.000	1.307.150.184	65,96%
3	Dinas Sosial	9.088.204.865	5.014.306.459	55,17%
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.337.888.795	2.599.074.321	48,69%
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.102.454.435	2.845.462.191	46,63%
6	Inspektorat Daerah	4.381.082.000	1.972.267.727	45,02%
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	417.808.372.029	180.591.247.258	43,22%
8	Dinas Kesehatan	135.854.049.711	58.265.842.484	42,89%
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.527.476.220	1.485.875.078	42,12%
10	Kecamatan Baki	1.589.945.500	634.184.383	39,89%
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	182.192.324.535	72.339.117.073	39,70%
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.093.847.000	2.625.610.665	37,01%
13	Sekretariat Daerah	31.281.942.000	11.352.702.493	36,29%
14	Sekretariat DPRD	47.605.026.536	16.804.465.296	35,30%

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.565.117.000	1.237.275.817	34,71%
16	Satuan Polisi Pamong Praja	8.900.876.500	3.037.024.584	34,12%
17	Kecamatan Kartasura	3.548.321.734	1.169.792.770	32,97%
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.240.231.500	4.174.033.805	31,53%
19	Kecamatan Bendosari	3.286.526.808	894.821.201	27,23%
20	Kecamatan Tawangsari	2.077.294.972	552.494.278	26,60%
21	Dinas Pangan	3.615.233.650	937.490.970	25,93%
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.138.819.200	2.626.334.335	25,90%
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.751.742.000	691.249.208	25,12%
24	Kecamatan Gatak	3.082.862.374	765.623.703	24,83%
25	Kecamatan Weru	2.153.941.000	527.679.765	24,50%
26	Dinas Perhubungan	40.454.721.772	9.739.552.912	24,08%
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.755.023.941	1.595.456.962	23,62%
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.659.182.808	4.753.967.745	23,01%
29	Dinas Lingkungan Hidup	30.145.523.299	6.197.795.399	20,56%
30	Kecamatan Grogol	2.943.155.000	605.100.258	20,56%
31	Kecamatan Mojolaban	3.202.650.732	649.437.045	20,28%
32	Kecamatan Nguter	2.874.868.000	575.545.321	20,02%
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan perdagangan	24.920.866.100	4.783.674.073	19,20%
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.683.825.330	1.646.899.249	18,97%
35	Kecamatan Polokarto	3.175.026.000	588.049.002	18,52%
36	Kecamatan Bulu	2.985.390.755	542.505.472	18,17%
37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.157.009.500	1.267.307.425	17,71%
38	Kecamatan Sukoharjo	25.256.910.600	4.275.409.807	16,93%
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.446.215.202	1.744.460.955	16,70%
40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.400.192.000	1.343.036.063	9,33%
	JUMLAH	**1.142.672.239.403**	**441.466.893.881**	**38,63%**

Sumber : Data diolah

Rekapitulasi perbandingan realisasi terhadap target APBD Kabupaten Sukoharjo oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisah dari laporan ini.

D. PERBANDINGAN KINERJA OPD DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah, disajikan perbandingan kinerja OPD Tahun Anggaran 2026 dengan capaian pada Tahun Anggaran 2025. Penyajian perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai perkembangan efektivitas pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan kinerja, serta memastikan bahwa setiap OPD menjalankan

tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh dasar yang lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 5.4

Perbandingan Kinerja OPD s.d Bulan Maret Tahun 2026 dengan Tahun 2025

RANK	PERANGKAT DAERAH	TA 2025 (%)	TA 2026 (%)	(+/-) %
1	Dinas Sosial	10,64	28,03	17,39
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,33	17,1	11,77
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19,63	30,13	10,5
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,8	17,45	8,65
5	Kecamatan Bulu	19,94	27,08	7,14
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,7	21,63	5,93
7	Sekretariat DPRD	17,47	21,44	3,97
8	Rumah Sakit Daerah	22,31	26,24	3,93
9	Kecamatan Grogol	15,39	19,3	3,91
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18,18	21,67	3,49
11	Sekretariat Daerah	16,48	19,71	3,23
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17,3	20,2	2,9
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	16,63	19,29	2,66
14	Satuan Polisi Pamong Praja	18,12	20,27	2,15
15	Inspektorat Daerah	17,22	19,31	2,09
16	Kecamatan Sukoharjo	13,47	15,53	2,06
17	Dinas Pangan	15,08	16,67	1,59
18	Kecamatan Gatak	20,37	21,87	1,5
19	Dinas Perhubungan	19,33	20,8	1,47
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,9	23,31	1,41
21	Kecamatan Kartasura	15,75	17,08	1,33
22	Kecamatan Mojolaban	18,77	20,02	1,25
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18,09	19,04	0,95
24	Dinas Lingkungan Hidup	19,91	19,9	-0,01
25	Dinas Pertanian dan Perikanan	13,75	13,38	-0,37
26	Kecamatan Tawangsari	18,45	17,97	-0,48
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,54	4,01	-0,53
28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16,65	15,85	-0,8
29	Kecamatan Nguter	19,55	18,75	-0,8
30	Dinas Kesehatan	19,23	17,79	-1,44
31	Kecamatan Bendosari	21,57	19,18	-2,39
32	Kecamatan Baki	21,95	18,94	-3,01

RANK	PERANGKAT DAERAH	TA 2025 (%)	TA 2026 (%)	(+/-) %
33	Kecamatan Weru	20,76	17,52	-3,24
34	Kecamatan Polokarto	21,42	18,13	-3,29
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20,4	16,04	-4,36
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13,73	8,06	-5,67
37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	20,59	14,4	-6,19
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	23,33	16,12	-7,21
39	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	35,42	21,63	-13,79
40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21,77	7,94	-13,83
	JUMLAH	**20,73**	**21,89**	**1,16**

Sumber : Data diolah

Laporan perbandingan belanja masing-masing Perangkat Daerah antara Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025 secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/900/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 7.831.000.000,00 dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 6.1
Capaian Penginputan RKO Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2026 s.d Maret 2026

No.	Uraian Kegiatan	Penginputan RKO	
		Sudah	Belum
DPMD			
1.	TMMD	✓	
DISPERTANIKAN			
2.	Pembangunan Embung Dk. Melikan RT 2 RW 1, Tanjungrejo, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo		✓
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dk. Gangin Kulon Desa Karangtengah Kec. Weru Kab. Sukoharjo		✓
DPKP			
4.	Pembangunan Talud / Penahan Tebing / Pembentuk Badan Jalan Pembangunan Talud Jalan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo		✓
5.	Rekonstruksi Jalan Pembangunan Rabat Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo		✓
6.	Rekonstruksi Jalan Pengaspalan Jalan Hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo		✓
DPUPR			
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendung Siluwur, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo		✓

Adapun capaian dari kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Bulan Maret 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.2

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2026 s.d Maret 2026

KEGIATAN	APBD PROVINSI	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
			KEUANGAN	% DARI KONTRAK/ SWAKELOLA	
DPMD					
Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	921.000.000	921.000.000	245.000.000	26.60	25
DISPERTANIKAN					
Pembangunan Embung Dk. Melikan RT 2 RW 1, Tanjungrejo, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo	1.000.000.000	0	0	0	0
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dk. Gangin Kulon Desa Karangtengah Kec. Weru Kab. Sukoharjo	1.000.000.000	0	0	0	0
DPKP					
Pembangunan Talud / Penahan Tebing / Pembentuk Badan Jalan Pembangunan Talud Jalan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	350.000.000	0	0	0	0
Rekonstruksi Jalan Pembangunan Rabat Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	970.000.000	0	0	0	0
Rekonstruksi Jalan Pengaspalan Jalan Hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo	540.000.000	0	0	0	0
DPUPR					
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendung Siluwur, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	3.050.000.000	0	0	0	0
TOTAL	**7.831.000.000**	**921.000.000**	**245.000.000**	**3.80**	**3.57**

Sumber : Data diolah

Dari 7 (tujuh) Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, baru 1 (satu) Kegiatan yang sudah mendapatkan verifikasi lengkap dari verifikator Provinsi, yaitu kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 6 (enam) kegiatan lainnya dalam proses inputing Rencana Kerja Operasional (RKO) dalam aplikasi online SIVERO yang saat ini dalam tahap perbaikan.

Kegiatan TMMD Sengkuyung I yang telah dilaksanakan di Desa Puron Kecamatan Bulu mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 11 Maret 2026 dengan realisasi. APBD Provinsi sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua Ratus Empat

Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan anggaran sharing yang digunakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

BAB VII
PROYEK STRATEGIS

Proyek Strategis untuk Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 000.7.6/125 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026.

Adapun perkembangan 10 (sepuluh) proyek strategis per 14 April 2026 sebagai berikut :

1. Pembangunan Masjid Kartasura (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Pengumuman Tender
2. Peningkatan Jalan Tanjunganom - Daleman (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 19.200.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 225 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Proses Mini Kompetisi
3. Peningkatan Jalan Adi Sumarmo (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 8.000.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Proses Mini Kompetisi
4. Pemeliharaan Pasar Kartasura (DISKOPUMDAG)
   Pagu Anggaran : Rp. 7.000.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Persiapan Tender
5. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten (DISHUB)
   Pagu Anggaran : Rp. 4.156.500.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Nilai Kontrak : Rp. 3.660.451.551,00
   Nama Penyedia : CV SINAR ABADI JAYA
   Waktu Pelaksanaan : 9 Januari – 8 Mei 2026
   Target Fisik : 85,13%
   Realisasi Fisik : 98,63%
   Deviasi : 13,50%
   Realisasi Keuangan : Rp. 3.100.000.000,00
6. Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo (DISKOPUMDAG)
   Pagu Anggaran : Rp. 3.775.900.000,00

Sumber Dana : APBD
Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
Tahapan Kegiatan : Persiapan Tender

7. Peningkatan Jalan Tawangsari-Pojok (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 2.500.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Persiapan Pengadaan
8. Peningkatan Jalan Ambil-Ambil Tanjung (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 2.000.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Persiapan Pengadaan
9. Rehabilitasi Jembatan Sayegan (DPUPR)
   Pagu Anggaran : Rp. 1.950.000.000,00
   Sumber Dana : APBD
   Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
   Tahapan Kegiatan : Persiapan Pengadaan
10. Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang-Mojo (DPUPR)
    Pagu Anggaran : Rp. 1.800.000.000,00
    Sumber Dana : APBD
    Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
    Tahapan Kegiatan : Proses Penyusunan RAB dan Spesifikasi Teknis

Adapun Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VIII
INFRASTRUKTUR

Sampai dengan bulan Maret 2026, pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Jumlah paket SIRUP	:	274 paket	
Belum Proses Pengadaan	:	226 paket	(82,48%)
Sedang Proses Pengadaan	:	19	(6,93%)
Selesai Proses Pengadaan	:	11 paket	(4,01%)
Progress Fisik	:	12,15 %	

Adapun rincian progress kegiatan infrastruktur sampai dengan November 2025 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Perkembangan Kegiatan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026
s.d bulan Maret 2026

No	Nama OPD	Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi (RUP)	Proses Pemilihan Penyedia			Progres Fisik (%)
			Belum Proses	Sedang Proses	Selesai Proses	
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	8	3	3	2	25,00%
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	64	52	4	8	10,94%
3	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	8	7	0	1	0,50%
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	94	94	0	0	0,00%
5	Kecamatan Sukoharjo	31	30	1	0	0,00%
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	16	16	0	0	0,00%
7	Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupten Sukoharjo	17	0	0	0	0,00%
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	18	18	0	0	0,00%

9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	11	0	11	0	0,00%
10	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	3	3	0	0	0,00%
11	Kecamatan Kartasura	2	2	0	0	0,00%
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	1	1	0	0	0,00%
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupten Sukoharjo	1	0	0	0	0,00%
	TOTAL	**274**	**226**	**19**	**11**	**12,15%**

Sumber : Data diolah

BAB X
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 adalah sebesar 441.732.696.889,00 (21,91%).
2. Dari 7 Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, baru 1 Kegiatan yang sudah mendapatkan verifikasi lengkap dari verifikator Provinsi, yaitu kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang telah berjalan 1 (satu) kali
3. Kegiatan proyek strategis yang sudah dalam progres pengerjaan adalah kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten dengan realisasi fisik sebesar 98,63% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.100.000.000,00 (84,69%).
4. Dari total 274 paket pekerjaan infrastruktur, 11 paket sudah selesai proses pengadaan dengan realisasi fisik mencapai 12,15%.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja APBD pada triwulan berikutnya, perangkat daerah perlu memprioritaskan percepatan proses pengadaan sehingga kegiatan dapat segera dmulai dan penyerapan anggaran berlangsung lebih merata sepanjang tahun. Pelaksanaan realisasi fisik harus dipercepat melalui penyusunan jadwal kerja yang jelas, penguatan koordinasi dengan penyedia, serta monitoring rutin terhadap progres pelaksanaan di lapangan. Setiap kendala teknis maupun administratif harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak menghambat capaian target. Upaya percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal melalui perputaran belanja pemerintah yang lebih cepat dan efektif.

Demikian gambaran singkat tentang kinerja kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 yang sudah berjalan sampai dengan bulan Maret 2026 sebagai bagian dari proses managerial, serta bahan evaluasi terhadap kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sukoharjo, April 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina
NIP 197603102011011006